

- Halim, Asmita Yulianingsih. 2022. "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Aksi Konvergensi Di Kabupaten Gowa."
- Handayani, Rina Tri, Aquartuti Tri Darmayanti, Catur Setyorini, Aris Widiyanto, and Joko Tri Atmojo. 2020. "Intervensi Gizi Dalam Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Asia." *Jurnal Keperawatan Global* 5:1–55.
- Haskas, Yusran. 2020. "Gambaran Stunting Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Doagnosis* 15(2):154–57.
- Hegantara Asep, Setiabudi Widya, dan alex Benny. 2021. "Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Balita Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Responsive* 4(3):163–71.
- Herawati, Dewi Marhaeni Diah, and Deni Kurniadi Sunjaya. 2022. "Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(20). doi: 10.3390/ijerph192013591.
- Hossain, Muttaquina, Nuzhat Choudhury, Khaleda Adib Binte Abdullah, Prasenjit Mondal, Alan A. Jackson, Judd Walson, and Tahmeed Ahmed. 2017. "Evidence-Based Approaches to Childhood Stunting in Low and Middle Income Countries: A Systematic Review." *Archives of Disease in Childhood* 102(10):903–9. doi: 10.1136/archdischild-2016-311050.
- Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Indar. 2021. *KAPITA SELEKTA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Ke 2 Revis. Yogyakarta: Gava Media.
- Kemenkes RI. 2018. "Buletin Stunting." *Kementerian Kesehatan RI* 301(5):1163–78.
- Kemenkes RI. 2021. *Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. doi: 10.36805/bi.v2i1.301.
- Kim, Sunny S., Rasmi Avula, Rajani Ved, Neha Kohli, Kavita Singh, Mara Van Den Bold, Suneetha Kadiyala, and Purnima Menon. 2017. "Understanding the Role of Intersectoral Convergence in the Delivery of Essential Maternal and Child Nutrition Interventions in Odisha, India: A Qualitative Study." *BMC Public Health* 17(1):1–12. doi: 10.1186/s12889-017-4088-z.
- Kusnadi, Dadang. 2015. "The Influence of Policy Implementation from the Change of Institutional Status Toward Quality of Patient Service in Hospital." *International Journal Od Scientific & Technology Research* 4(10):159–64.

- Masereka, Enos Mirembe, Arthur Kiconco, Edson Katsomyo, and Clement Munguiko. 2020. "The Prevalence and Determinants of Stunting among Children 6 - 59 Months of Age in One of the Sub-Counties in the Rwenzori Sub-Region, Western Uganda." *Open Journal of Nursing* 10(03):239–51. doi: 10.4236/ojn.2020.103016.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Multicentre Growth Reference Study. 2007. "WHO Child Growth Standards Based on Length / Height , Weight and Ag." *Acta Paediatrica* 95(S450):76–85. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2006.tb02378.x>.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Murni. 2019. "Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Walikota Kendari." Hasanuddin.
- Nawawi, I. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. Surabaya: PMN CV Putra Media Nusantara.
- de Onis, Mercedes, and Francesco Branca. 2016. "Childhood Stunting: A Global Perspective." *Maternal and Child Nutrition* 12:12–26. doi: 10.1111/mcn.12231.
- De Onis, Mercedes, Kathryn G. Dewey, Elaine Borghi, Adelheid W. Onyango, Monika Blössner, Bernadette Daelmans, Ellen Piwoz, and Francesco Branca. 2013. "The World Health Organization's Global Target for Reducing Childhood Stunting by 2025: Rationale and Proposed Actions." *Maternal and Child Nutrition* 9(S2):6–26. doi: 10.1111/mcn.12075.
- Palutturi, S. 2015. *Health Politics*. Volume I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permanasari, Yurista, Meda Permana, Joko Pambudi, Bunga Christitha Rosha, Made Dewi Susilawati, Ekowati Rahajeng, Agus Triwinarto, and Rachmalina S. Prasodjo. 2020. "Tantangan Implementasi Konvergensi Pada Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Prioritas." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 30(4):315–28. doi: 10.22435/mpk.v30i4.3586.
- Pratama, Bagus, Dian Isti Anggraini, and Khairun Nisa. 2019. "LITERATUR REVIEW Penyebab Langsung (Immediate Cause) Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Anak Immediate Cause Affects Stunting in Children." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10(2):299–303. doi: 10.35816/jjskh.v10i2.167.
- Prendergast, Andrew J., and Jean H. Humphrey. 2014. "The Stunting Syndrome in Developing Countries." *Paediatrics and International Child Health* 34(4):250–65. doi: 10.1179/2046905514Y.0000000158.
- Purwanto, E. A. 2012. *Impelementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Indonesi*. Yogyakarta: Gramedia.
- Rahardjo. 2010. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN.

- Rahayu, D. K. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahman, Abd. 2019. "Analisis Kebijakan Implementasi Akreditasi Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamuju." Hasanuddin.
- Rawung, Deisi J. 2019. "Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Palu (Studi Pusat Kesehatan Masyarakat)." *Katalogis* 138–44.
- Razak, Amran, Sri Harpina, and Ratno Adrianto. 2020. "Political Commitment of Local Government in Handling Stunting During the Covid-19 Pandemic : A Case Study of Enrekang District." 20(4):2173–81.
- Riskesdas. 2018. *Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018*. Vol. 110.
- Satori, D., and A. Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- Setyawan, Dody, Agus Priantono, and Firman Firdausi. 2021. "George Edward Iii Model." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial* 3(2):9–19. doi: 10.51747/publicio.v3i2.774.
- Stewart, Christine P., Lora Iannotti, Kathryn G. Dewey, Kim F. Michaelsen, and Adelheid W. Onyango. 2013. "Contextualising Complementary Feeding in a Broader Framework for Stunting Prevention." *Maternal and Child Nutrition* 9(S2):27–45. doi: 10.1111/mcn.12088.
- Subarsono, A. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudikno, Irlina Raswanti Irawan, Budi Setyawati, Yunita Diana Sari, Yuana Wiryawan, Dyah Santi Puspitasari, Yekti Widodo, Feri Ahmadi, Rika Rachmawati, Nurillah Amaliah, Prisca Petty Arfines, Bunga Christitha Rosha, Joko Pambudi, Aditianti, Elisa Diana Julianti, and Amalia Safitri. 2019. "Laporan Akhir Penelitian Status Gizi Balita Tahun 2019." *Kemenkes RI* 1–150.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suhadi, RK. 2015. *Perencanaan Puskesmas*. Jakarta: Trans Info Media.
- Suharto, Teguh, Asriwati Amirah, and Rizki Ichwansyah. 2022. "Implementation of Convergence Action to Accelerate Stunting Reduction in Labuhan Batu Regency, North Sumatra." *Journal of Community Health Provision* 2(3):155–62. doi: 10.55885/jchp.v2i3.142.
- Sunaryo, Dian Rosa, and Ria Arifianti. 2022. "Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung." 4:205–13.
- Suprihartono, E., Bakhri, M. S., & Hidayat, M. 2019. "Nno Cost Recovery Project: Kasus Stunting Di Indonesia."
- Suratman. 2017. *Kebijakan, Generasi Implementasi Dan Evaluasi Publik*. Surabaya: CAPIYA.
- Tilaar, Dwijowijoto. 2013. *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- TNP2K RI. 2018. "Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting." *TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia* 96.
- UNICEF/WHOWORLD BANK. 2021. "Levels and Trends in Child Malnutrition UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates Key Findings of the 2021 Edition." *World Health Organization* 1–32.
- UNICEF. 2013. *Improving Child Nutrition - The Achievable Imperative for Global Progress*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori, Dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- World Bank. 2019. "Success Stories with Reducing Stunting : Lessons for PNG." *Health Nutrition & Population EAP* 1(1):1–14.

LAMPIRAN



**INFORMED CONSENT PENELITIAN
IMPLEMENTASI AKSI KONVERGENSI PADA PROGRAM STUNTING
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : L / P

Jabatan :

Instansi :

No Telp / Hp :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan setuju dan bersedia untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Annie Yunita Tandi selaku mahasiswi Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dengan judul **“Implementasi Aksi Konvergensi pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara”**.

Saya akan memberikan informasi yang sebenarnya sesuai yang saya ketahui dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta menyetujui metode pengambilan informasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan wawancara, menggunakan alat perekam suara dan alat dokumentasi (kamera).

Toraja Utara, September 2022
Informan,

.....



**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI AKSI KONVERGENSI PADA PROGRAM STUNTING
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Nama Informan :

Umur Informan :

Jenis Kelamin : L / P

Jabatan :

Instansi :

No Telp / HP :

Alamat :

Komunikasi

1. Bagaimana pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting di Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting untuk mengetahui maksud dan tujuan aksi konvergensi?
3. Bagaimana bentuk/mekanisme sosialisasi pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting di instansi bapak/ibu?
4. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi aksi konvergensi pada program stunting?
5. Apakah sosialisasi aksi konvergensi pada program stunting berjalan dengan konsisten dan mengetahui maksud dan tujuan kebijakan oleh pelaksana kebijakan? (ada kendala atau permasalahan dalam mengimplementasikan)

Sumber Daya

1. Apakah ada buku pedoman/juknis tentang aksi konvergensi pada program stunting di instansi bapak/ibu?
2. Bagaimana ketersediaan SDM dalam pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting di instansi bapak/ibu? Apakah sudah cukup terpenuhi? Bila cukup, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensinya dan bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan SDM?
3. Bagaimana ketersediaan anggaran di instansi bapak/ibu dalam mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting? Apakah sudah cukup

- sesuai dengan kebutuhan? Bila cukup, berapa jumlah yang dianggarkan dan untuk apa saja? Bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan anggaran tersebut?
4. Bagaimana ketersediaan fasilitas di instansi bapak/ibu untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting? Apakah sudah terpenuhi sesuai standar? Bila sudah terpenuhi, apakah ada standarnya? Bila tidak terpenuhi, apa kendalanya dan apakah ada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas dari pemerintah kabupaten atau ada kebijakan instansi tersendiri?
 5. Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan aksi konvergensi pada program stunting? Bila ada, apakah relevan dan kewenangan dalam bentuk tertulis? Bila tidak apa kendalanya?

Sikap/Disposisi

1. Bagaimana peran aktif pelaksana aksi konvergensi pada program stunting di instansi Bapak/Ibu?
2. Apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting di instansi Bapak/Ibu?
3. Bagaimana komitmen pelaksana program dalam mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting di instansi Bapak/Ibu?
4. Apakah ada uraian tugas yang diberikan kepada pelaksana aksi konvergensi pada program stunting (berupa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab)? Bila ada, apakah pelaksana program dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan?
5. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait aksi konvergensi pada program stunting?

Struktur Birokrasi

1. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan aksi konvergensi pada program stunting?
2. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting?
3. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sector terkait dalam melaksanakan aksi konvergensi pada program stunting?
4. Bagaimana peran antara instansi/lembaga/sector terkait untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting?
5. Apakah ada kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan aksi konvergensi pada program stunting?

**Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara
Berdasarkan Variabel Komunikasi oleh Informan Kunci**

Komunikasi	Emik (Sudut Pandang Informan Kunci)			Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	YRS	ELH	DLR	
Transmisi	Komunikasi sudah dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk pertemuan dengan mengundang semua stakeholder yang terlibat	Sosialisasi sudah dilaksanakan kepada semua stakeholder khususnya kepada kurang lebih 14 OPD terkait yg menangani konvergensi stunting, oleh karena itu, stunting bukan hal baru lagi. Sudah ada regulasi, penggunaan media komunikasi	Komunikasi melalui sosialisasi kepada OPD telah dilaksanakan, sudah sampai ke tingkat kecamatan dan lembang	Seluruh informan menyatakan bahwa komunikasi telah dilaksanakan dalam belum sosialisasi melalui pertemuan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten yang mengundang perangkat daerah, stakeholder dan lintas sektor lainnya dan juga ditindaklanjuti ke tingkat kecamatan dan lembang
Kejelasan	Informasi yang disampaikan sudah cukup jelas	Informasi terkait aksi konvergensi dalam program stunting sudah sangat jelas, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat paling bawah	Informasinya sudah cukup jelas, bahkan tahun ini sudah ditindaki dengan kegiatan audit kasus stunting	Seluruh infroman menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sudah cukup jelas
Konsistensi	Sudah konsisten mulai dari perencanaan sampai evaluasi	Terkait informasi pelaksanaan aksi kovergensi sudah konsisten	Sudah konsisten sesuai dengan arahan presiden, termuat dalam peraturan presiden tentang percepatan penurunan stunting melalui 8 aksi konvergensi	Seluruh informan menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sudah konsisten
Kendala	Kurangnya perhatian dan keseriusandari perangkat daerah sehingga program yang ada tidak fokus menyelesaikan masalah yang ada	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Kurangnya perhatian dan keseriusandari perangkat daerah sehingga program yang ada tidak fokus menyelesaikan masalah yang ada

**Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara
Berdasarkan Variabel Komunikasi oleh Informan**

Komunikasi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
Transmisi	HSP	Sudah ada sosialisasi di tingkat kabupaten tentang aksi konvergensi program stunting, berupa pertemuan dengan melibatkan semua OPD terkait, dihadiri unsur pimpinan, perwakilan DPR	bahwa penyampaian informasi terkait aksi konvergensi pada program stunting telah dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan melalui sosialisasi dalam bentuk pertemuan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, bahkan tingkat kelurahan/lembang, kegiatan sosialisasi perlu dimaksimalkan tidak hanya melalui pertemuan atau rapat tetapi juga melibatkan berbagai media yang ada sehingga sosialisasi bisa tersampaikan dengan baik sampai kepada masyarakat sebagai penerima layanan
	FDT	Sudah ada sosialisasi tingkat kabupaten yang melibatkan OPD yang khusus terlibat dalam aksi konvergensi	
	YRP	Informasi sudah diperoleh melalui sosialisasi berupa pertemuan yang mengundang opd dan pertemuan lintas sektor tingkat kecamatan tapi baru sebatas pertemuan, belum memanfaatkan media	
	RED	Sudah pernah ada sosialisasi yang di adakan oleh bappeda dan dinas kesehatan, pernah juga dilaksanakan oleh provinsi di kabupaten	
	JOA	Sudah dilaksanakan sosialisasi dalam bentuk pertemuan di tingkat kabupaten dan di tindaklanjuti ke tingkat kecamatan yang masuk daerah lokus	
	ALD	Sosialisasi sudah dilaksanakan, bahkan setiap tahun sudah dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun daerah	
	MAM	Sosialisasi sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten melalui rapat, rembuk stunting tingkat kabupaten, bahkan sekarang sudah dilaksanakan di tingkat desa, sudah ada rembuk stunting tingkat desa dengan melibatkan nakes yang ada di desa, tim percepatan tk desa dan KPM	
	ALP	informasi kami terima melalui sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Bappeda di tingkat kabupaten	
	ATS	Informasi diterima melalui sosialisasi berupa pertemuan, tahun ini sudah tahun ketiga	
	PSP	Sosialisasi sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten oleh bappeda, dinas kesehatan dan kb yang melibatkan semua yang terlibat dalam 8 aksi konvergensi	
	ALM	Sosialisasi sudah dilaksanakan lewat pertemuan tk kabupaten dengan mengundang beberapa opd terkait, kami juga lewat tenaga PKH sudah turun untuk sosialisasi terkait stunting	
	HAA	Sosialisasi sudah dilaksanakan setiap tahunnya	
VIP	Untuk sosialisasi sudah pernah dilakukan tapi yang ikut kepala dinas		

Komunikasi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	RAH	Sosialiasi sudah dilakukan lewat pertemuan bahkan tahun ini sudah ditindaklanjuti sampai ke pemerintah tingkat desa	
Kejelasan	HSP	Informasi yang diterima sudah jelas dan itu juga yang selanjutnya kami informasikan kepada teman-teman di puskesmas	kejelasan informasi yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini Bappeda dan Dinas Kesehatan secara umum menganggap sudah jelas tentang maksud dan tujuan pelaksanaan aksi konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting
	FDT	Informasi yang diterima sudah jelas dan kami tindaklanjuti kepada tenaga pendidik di tingkat PAUD	
	YRP	Informasi yang sudah jelas, apalagi stunting merupakan program nasional	
	RED	Informasi sudah jelas tentang konvergensi, aksi 1-8,, intervensi yang dilakukan setiap OPD harus terintegrasi demi satu tujuan percepatan penurunan stunting	
	JOA	Informasi yang kami diterima sudah sangat jelas	
	ALD	informasi yang disampaikan sudah jelas	
	MAM	informasi terkait aksi konvergensi sudah jelas, sudah kami tindaklanjuti kepada kader pembangunan manusia yang ada di setiap lembang yang melakukan pendampingan terkait penurunan stunting	
	ALP	informasi sudah jelas, setiap dinas punya peran dalam 8 aksi konvergensi dan harus dilakukan secara terintegrasi	
	ATS	Informasi sudah jelas	
	PSP	Informasi sudah jelas, sudah berapa kali disampaikan di pertemuan	
	ALM	informasi yang diterima sudah jelas, ada pansuan yang dipedomani	
	HAA	sudah cukup jelas	
	VIP	informasi yang diperoleh sudah jelas dan itu kami tindaklanjuti kepada tenaga penyuluh kami	
	RAH	informasi terkait aksi konvergensi ini sudah disampaikan secara jelas sebagaimana yang tertuang dalam perpres 72 tahun 2021.	

Komunikasi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
Konsistensi	HSP	informasi yang kami terima sudah konsisten, karena dari awal kita sudah disampaikan dalam beberapa pertemuan, bahkan informasi itu juga sudah pernah kami dapatkan ditingkat provinsi	informasi yang diterima dari Bappeda maupun Dinas Kesehatan sudah cukup konsisten karena tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan
	FDT	Informasi yang diterima sudah konsisten melalui 8 aksi kegiatan	
	YRP	Sudah konsisten tapi belum maksimal meskipun sudah sampai ke lembang tapi yang diundang terbatas	
	RED	Informasi yang diterima sudah konsisten karena sdh di sampaikan baik melalui provinsi maupun kabupaten	
	JOA	informasi jelas dan konsisten	
	ALD	Sudah konsisten, sudah disampaikan di beberapa pertemuan	
	MAM	konsistensi informasinya sudah bagus, karena setiap lembang sudah punya memiliki tim percepatan dan juga memiliki tim pendamping dalam hal ini kader pendamping desa	
	ALP	sudah konsisten, informasi yang kami dapatkan sudah jelas, baik itu dari Bappeda maupun dari Dinas Kesehatan	
	ATS	Informasinya sudah konsisten	
	PSP	Informasi terkait aksi konvergensi sudah konsisten	
	ALM	informasi sudah cukup konsisten	
	HAA	apa yang disampaikan terkait aksi konvergensi sudah konsisten	
VIP	penyampaian informasi terkait aksi konvergensi dari pimpinan sudah jelas dan konsisten sehingga pelaksanaannya sudah sangat terkoordinir dengan baik, lokus stunting juga sudah jelas		
RAH	informasi aksi konvergensi sudah konsisten, baik itu yang diperoleh pada pertemuan tingkat provinsi, kabupaten maupun yang disampaikan teman2 di lapangan		
Kendala	HSP	Tidak ada kendala	
	FDT	Baru sebatas pertemuan, belum ada juknis	
	YRP	Sosialisasi masih dominan berupa pertemuan, belum ditindaklanjuti dengan publikasi melalui media lainnya	

Komunikasi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
		dan seringkali kurang mendapat perhatian dari lintas sektor yang diundang	
	RED	Kurang maksimal karena formula data yang ada di setiap opd berbeda	
	RAH	penyampaian informasi tidak ada kendala	

Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Variabel Sumber Daya oleh Informan Kunci

Sumber Daya	Emik (Sudut Pandang Informan Kunci)			Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	YRS	ELH	DLR	
Sumber Daya Manusia	Ketersediaan sumber manusia sudah terpenuhi, baik di tingkat kabupaten maupun lembaga	Ketersediaan sumber daya manusia untuk aksi konvergensi di kabupaten sudah cukup, khususnya di bidang kesehatan masih terbatas, tenaga gizi puskesmas masih terbatas, masih ada tenaga gizi yang sifatnya kontrak daerah sehingga tentunya ke depan perlu dipikirkan terkait kontinuitas keberadaan tenaga gizi	Sumber daya manusia yang ada sudah terpenuhi, tetapi dari segi kompetensi mungkin yang masih perlu diperhatikan	ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kabupaten sudah cukup
Anggaran	Ketersediaan anggaran yang berupa support untuk melaksanakan kegiatan pertemuan di tingkat kabupaten sudah ada, tetapi dana untuk mendukung kegiatan intervensi langsung di lapangan yang masih kurang	Ketersediaan anggaran sudah teralokasi baik	Anggaran masih sangat minim, kelurahan saja tidak memiliki anggaran untuk intervensi stunting, OPD juga masih mengalami hal yang sama	Ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten dalam hal pembiayaan rapat/pertemuan sudah terpenuhi, namun anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi yang masih kurang
Fasilitas	Ketersediaan fasilitas untuk mendukung kegiatan aksi konvergensi sudah cukup memadai	Fasilitas untuk mendukung kegiatan puskesmas masih kurang	Fasilitas yang ada terutama antropometri masih kurang dan sudah tidak terstandar	ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi di tingkat kabupaten, dalam hal ini aksi 1 sampai dengan 8 sudah cukup memadai, yang masih menjadi masalah adalah ketersediaan fasilitas pendukung di sektor kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan

Sumber Daya	Emik (Sudut Pandang Informan Kunci)			Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	YRS	ELH	DLR	
Informasi dan Kewenangan	Informasi yang sudah diberikan sepenuhnya kepada setiap opd yang terlibat	informasi dan kewenangan saya kira sudah jelas, setiap OPD yang terlibat dan Tim Percepatan Penurunan Stunting sudah diberikan kewenangan sepenuhnya oleh pimpinan daerah dalam melaksanakan aksi konvergensi	informasi dan kewenangan sudah diberikan sepenuhnya oleh pimpinan melalui Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting	Informasi dan kewenangan sudah diberikan kepada setiap opd sebagai pelaksana aksi konvergensi melalui
Kendala	Ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan intervensi masih terbatas	Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga gizi, fasilitas (alat pengukuran) masih terbatas	Kualitas sdm masih terbatas, anggaran masih minim, fasilitas (antropometri) masih kurang	

Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Variabel Sumber Dayai oleh Informan

Sumber Daya	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
Sumber Daya Manusia	HSP	SDM di dinkes untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi di dinas sudah cukup, kendala yang ada petugas gizi yang masih kurang di lapangan	ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kabupaten sudah cukup, yang menjadi masalah ada ketersediaan sumber daya manusia di sektor kesehatan yang mendukung layanan intervensi dalam hal ini tenaga gizi yang masih terbatas
	FDT	SDM di dinas pendidikan sudah cukup, dan sudah dilaksanakan pelatihan bagi semua perwakilan tenaga pendidik dari setiap paud	
	YRP	Ketersediaan SDM di dinas sudah cukup, di puskesmas belum cukup, masih ada petugas gizi dijalankan oleh perawat/bidan	
	RED	Ketersediaan SDM sudah cukup memadai, tinggal peningkatan kompetensinya	
	JOA	Ketersediaan SDM sudah cukup memadai, apalagi di setiap kecamatan kami memiliki pendamping keluarga yang tentunya mendukung program stunting	
	ALD	ketersediaan SDM sudah cukup untuk kegiatan aksi konvergensi	
	MAM	SDM di dinas kami sudah cukup dan untuk tingkat desa.lembang juga sudah cukup karena ada desa/lembang yang memiliki KPM lebih dari 1 orang	
ALP	ketersediaan SDM sudah terpenuhi		

Sumber Daya	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	<p>ATS</p> <p>PSP</p> <p>ALM</p> <p>HAA</p> <p>VIP</p> <p>RAH</p>	<p>ketersediaan SDM masih terbatas</p> <p>ketersediaan sudah cukup memenuhi</p> <p>SDM belum memadai tapi kami cukup dibantu dengan adanya PKH</p> <p>SDM kami masih kurang, terutama tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan intervensi dari aksi konvergensi ini di lapangan yaitu yang menangani air bersih</p> <p>ketersediaan SDM, khususnya di dinas kami, kami masih kekurangan tenaga penyuluh. Idealnya 1 desa 1 penyuluh, kenyataan di lapangan yang ada 1 kecamatan 1 penyuluh</p> <p>kalau SDM sudah terpenuhi, apalagi dengan ketersediaan pendamping untuk desa</p>	
Anggaran	<p>HSP</p> <p>FDT</p> <p>YRP</p> <p>RED</p> <p>JOA</p> <p>ALD</p> <p>MAM</p> <p>ALP</p> <p>ATS</p> <p>PSP</p>	<p>Ketersediaan anggaran masih kurang untuk mendukung aksi konvergensi, sumber DAK Non Fisik</p> <p>Anggaran sudah cukup dan memadai untuk mendukung program kami, yaitu sosialisasi dan pelatihan terkait penanganan stunting di tingkat paud</p> <p>Ketersediaan anggaran belum cukup memadai, hanya bersumber dari dana DAK Non Fisik, alokasi dana DAU sangat terbatas dan selalu terjadi pemotongan</p> <p>Ketersediaan anggaran masih terbatas</p> <p>Untuk anggaran ada tapi masih sangat terbatas</p> <p>ketersediaan anggaran sudah memadai tinggal bagaimana pengalokasiannya</p> <p>Untuk anggaran (aksi 4 dan 5) bersumber dari DAK Non Fisik yg melekat di dinkes, untuk kpm dananya melekat di dana lembang, anggaran intervensi juga sudah tercover di dana lembang</p> <p>anggaran masih sangat kurang</p> <p>anggaran untuk pelaksanaan aksi konvergensi ini masih kurang</p> <p>untuk anggaran yang mendukung pelaksanaan aksi konvergensi ini masih sangat terbatas</p>	<p>Ketersediaan anggaran yang masih terbatas dalam pelaksanaan intervensi di setiap perangkat daerah</p>

Sumber Daya	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	ALM	anggaran untuk pelaksanaan aksi konvergensi ini masih terbatas	
	HAA	masih terbatas karena belum mampu memenuhi semua permintaan yang ada di masyarakat, belum terfokus kepada masalah stunting, untuk data sasaran stunting belum punya	
	VIP	ketersediaan anggaran belum mencukupi apa bila dibandingkan dengan jumlah lokus yang ada	
	RAH	anggaran terbatas tetapi harus tetap dimaksimalkan	
Fasilitas	HSP	Ketersediaan alat ukur terstandar di puskesmas masih sangat kurang, antropometri masih kurang, untuk di dinas sudah cukup memadai	ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi di tingkat kabupaten, dalam hal ini aksi 1 sampai dengan 8 sudah cukup memadai, yang masih menjadi masalah adalah ketersediaan fasilitas pendukung di sektor kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan terutama dalam pengukuran, jumlah alat ukur yang terstandar masih sangat kurang
	FDT	Fasilitas sudah memadai	
	YRP	Ketersediaan alat yang terstandar belum cukup memadai, antropometri, timbangan digital, semua desa harusnya punya itu	
	RED	Fasilitas sudah cukup memadai untuk mendukung program kami terkait aksi konvergensi stunting terutama dalam kegiatan pendataan yang kami lakukan	
	JOA	fasilitas sudah cukup memadai	
	ALD	Bicara fasilitas yang ada di tingkat kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan aksi konvergensi sudah terpenuhi, tapi memang tidak ada standar baku yang mengatur, kebutuhan fasilitas tergantung kebijakan dari opd masing-masing	
	MAM	Ketersediaan fasilitas untuk mendukung kegiatan aksi konvergensi sudah cukup memadai	
	ALP	ketersediaan fasilitas di dinas kami sudah terpenuhi	
	ATS	ketersediaan fasilitas sudah cukup memadai	
	PSP	sudah cukup terpenuhi	
	ALM	untuk fasilitas pendukung sudah terpenuhi	
	HAA	terkait ketersediaan fasilitas yang mendukung sudah memenuhi	

Sumber Daya	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	VIP	untuk mendukung kegiatan ini, fasilitas yang ada sudah cukup memadai	
	RAH	sudah cukup terpenuhi	
Informasi dan Kewenangan	HSP	informasi dan kewenangan sudah jelas dan sudah diberikan dari pimpinan ke masing-masing bidang yang terkait	pimpinan unit kerja telah memberikan kewenangan kepada bidang atau bagian untuk terlibat dalam aksi konvergensi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari bidang tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan unit kerja memberikan informasi dan kewenangan sepenuhnya kepada bidang terkait untuk melaksanakan aksi konvergensi sesuai dengan keterlibatan masing-masing
	FDT	kewenangan dari pimpinan sudah diberikan dan dipercayakan sepenuhnya dari pimpinan kepada pelaksana kegiatan	
	YRP	Kewenangan sudah diberikan sepenuhnya oleh pimpinan	
	RED	Informasi sudah jelas dan kewenangan sudah diberikan kepada kami	
	JOA	Pimpinan memberikan kewenangan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan/program yang ada	
	ALD	Pimpinan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kami dalam melaksanakan aksi konvergensi	
	MAM	kewenangan sudah diberikan berdasarkan tupoksi masing-masing bidang yang terlibat	
	ALP	informasi dan kewenangan sudah diberikan sepenuhnya kepada bidang terkait	
	ALP	informasi dan kewenangan yang diberikan sudah sesuai	
	ATS	informasi sudah sesuai dan sudah diberikan kepada kami berdasarkan tupoksi yang ada	
	PSP	Informasi sudah jelas dan kewenangan sudah diberikan kepada kami	
	ALM	Pimpinan memberikan kewenangan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan/program yang ada	
	HAA	pimpinan sudah memberikan kewenangan kepada kami	
	VIP	informasi dan kewenangan sudah sesuai dan diberikan berdasarkan tupoksi dari masing-masing yang terlibat	
	RAH	Informasi sudah sesuai dan kewenangan sudah diberikan	
		informasi dan kewenangan sudah diberikan	
Kendala	HSP	Ketersediaan sdm, anggaran dan fasilitas pendukung di puskesmas	

Sumber Daya	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	FDT	Pengaanggaran untuk monev terkait pelaksanaan kegiatan di lokus yang ada yang masih perlu di pikirkan	
	YRP	Kendala di lapangan, tenaga yang kurang dan kompetensi yang masih sangat terbatas terutama dalam hal pengukuran	
	RED	Peningkatan kapasitas SDM belum ada Ketersediaan jumlah SDM yg memadai tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas	

**Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara
Berdasarkan Variabel Sikap/Disposisi oleh Informan Kunci**

Sikap/Disposisi	Emik (Sudut Pandang Informan Kunci)			Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	YRS	ELH	DLR	
Komitmen dan dukungan	Peran dan dorongan dari pimpinan dalam rangka percepatan penurunan stunting sudah sangat luar biasa	Pimpinan daerah sudah sangat mendukung, terbukti dengan agenda rutin setiap hari jumat untuk membahas stunting, sama halnya dengan dukungan dan komitmen bersama teman-teman pelaksana di puskesmas	Pimpinan sudah sangat mendukung pelaksanaan aksi konvergensi ini	Pimpinan daerah sangat mendukung pelaksanaan aksi konvergensi. Sebagai bentuk dan keseriusan pimpinan daerah dalam hal aksi konvergensi pada program stunting, setiap hari Jumat dilakukan pertemuan untuk membahas masalah stunting
Kendala	Perhatian leading sektor yang masing kurang sehingga apa yang disampaikan tidak tersampaikan	Tidak ada kendala	Perhatian teman-teman perangkat daerah yang terlibat langsung kurang member perhatian, Keterlibatan semua stakeholder, masih ada yang berjalan sendiri-sendiri	Perhatian OPD yang terlibat aksi konvergensi yang masih kurang

**Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara
Berdasarkan Variabel Sikap/Disposisi oleh Informan**

Sikap/Disposisi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
Komitmen dan dukungan	HSP	Dukungan dan komitmen pimpinan sangat bagus, baik di dinas maupun puskesmas dan masyarakat, uraian tugas jelas berdasarkan SK yang ada dan juga tupoksi masing-masing	pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dan pimpinan unit kerja/opd sangat mendukung pelaksanaan aksi konvergensi. Sebagai bentuk dan keseriusan pimpinan daerah dalam hal aksi konvergensi pada program stunting, setiap hari Jumat dalam minggu berjalan, dilakukan pertemuan monitoring tingkat kabupaten yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting dengan mengundang semua OPD terkait yang terlibat dalam kegiatan aksi konvergensi program stunting
	FDT	Pimpinan sangat aktif dan mendukung terkait pelaksanaan aksi konvergensi ini, uraian tugas melekat pada SK dan tupoksi	
	YRP	Pimpinan sangat mendukung pelaksanaan aksi konvergensi, apa lagi tahun ini kita sudah memiliki agenda rutin untuk rapat membahas kasus stunting dan di dinas juga kita sudah ada tim yang mendampingi puskesmas	
	RED	Peran aktif pimpinan sangat luar biasa dalam mendukung pelaksanaan aksi konvergensi	
	JOA	Pimpinan daerah dalam hal ini bupati dan kepala dinas sangat mendukung dan berkomitmen dalam mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting, koordinasi juga sudah berjalan dengan baik antar bidang	
	ALD	pimpinan sudah sangat mendukung baik di tingkat opd maupun pimpinan daerah, sudah ada rapat setiap minggu yang membahas stunting	
	MAM	Pimpinan memiliki komitmen yang besar dalam rangka percepatan penurunan stunting, bahkan sekarang sudah dibuatkan wa grup untuk memudahkan koordinasi tentang aksi konvergensi dan pimpinan selalu merespon dan mengontrol kegiatan yang berjalan	
	ALP	pimpinan sudah cukup komitmen dalam mendukung kegiatan aksi konvergensi	
	ATS	pimpinan sangat berkomitmen dan mendukung pelaksanaan aksi konvergensi ini, pimpinan sangat aktif dalam mendorong kami terutama dalam menyusun program-program yang mendukung pelaksanaan aksi konvergensi ini	
	PSP	Kepala dinas sangat mendukung, apalagi dengan disiplin ilmu yang ada jadi koordinasi sangat terlaksana dengan baik	
ALM	komitmen dan dukungan sudah cukup baik mulai dari pimpinan daerah sampai kepada pimpinan OPD		

Sikap/Disposisi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	HAA	komitmen dan dukungan pimpinan sudah cukup bagus, di tingkat kabupaten sudah diakomodir dengan membuat wa group untuk membahas terkait stunting	
	VIP	dukungan pimpinan sudah sangat luar biasa	
	RAH	komitmen dan dukungan pimpinan sudah baik, tidak hanya di tingkat kabupaten yaitu dari bupati tetapi juga dalam lingkup dinas peran aktif dan dukungan pimpinan daerah sangat baik, agenda rutin hari jumat merupakan salah satu wujud komitmen dan keseriusan dari pimpinan daerah	
Kendala	HSP	Intervensi belum maksimal karena Keterbatasan anggaran	
	YRP	Dukungan pemerintah sangat baik tp kenyataan di lapangan belum maksimal karena kenyataan di lapangan tidak konvergensi karena intervensi ada yang tidak tepat sasaran diakibatkan oleh koordinasi yang belum maksimal tapi tahun ini kami sudah melakukan perbaikan, apalagi sudah ada rapat tiap minggu dan sudah ada audit kasus stunting	
	RED	Data yang belum sinkron karena formula data yang beda (kriteria)	
	ALD	perhatian opd terkait untuk menginput laporan kegiatannya, alokasi anggaran lembang yang menjadi lokus harus fokus terhadap intervensi di daerahnya	
	MAM	anggaran untuk aksi konvergensi di tingkat keluarahan yang masih perlu dipikirkan	

Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Variabel Struktur Birokrasi oleh Informan Kunci

Struktur Birokrasi	Emik (Sudut Pandang Informan Kunci)			Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	YRS	ELH	DLR	
SOP	Belum ada SOP	mengacu pada peraturan yang ada dan rencana strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, belum ada SOP	belum ada SOP tersendiri, kami masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	mengimplementasikan aksi konvergensi pada program stunting di Kabupaten Toraja Utara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting, belum ada SOP khusus yang dibuat terkait pelaksanaan aksi konvergensi program stunting

Struktur Birokrasi	Emik (Sudut Pandang Informan Kunci)			Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	YRS	ELH	DLR	
Fragmentasi	Pembagian kerja dan tanggung jawab sudah jelas, tim sudah dibentuk, uraian tugas berdasarkan SK Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting	Pembagian kerja dan tanggung jawab mengacu kepada SK Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten	Pembagian kerja sudah jelas dan sudah diperkuat dengan SK Bupati	Pembagian kerja sudah jelas, tim percepatan telah dibentuk, didasarkan pada SK Bupati

Matriks Analisis Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Variabel Struktur Birokrasi oleh Informan

Struktur Birokrasi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
SOP	HSP	SOP khusus pelaksanaan konvergensi belum ada, yang ada baru SOP terkait program stunting	pelaksanaan aksi konvergensi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
	FDT	Belum ada SOP	
	YRP	Belum ada SOP khusus konvergensi, yang ada baru SOP pelacakan kasus stunting, sekarang mengacu ke perpres 72 tahun 2021	
	RED	SOP belum ada	
	JOA	Mengacu kepada perpres 72 tahun 2021	
	ALD	mengacu ke pedoman pelaksanaan aksi konvergensi dan perpres 72	
	MAM	Belum ada, masih mengacu kepada perpres 72 tahun 2021	
	ALP	belum ada	
	ATS	belum ada SOP	
PSP	belum ada SOP khusus		

Struktur Birokrasi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	ALM HAA VIP RAH	belum ada belum ada SOP belum ada mengacu kepada perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan turunan rencana aksi strategis yang ada	
Fragmentasi	HSP FDT YRP RED JOA ALD MAM ALP ATS PSP	Tim ada dengan pembagian kerja sudah sangat jelas, mengacu kepada SK yang ada, koordinas antar program dan antar opd juga berjalan dengan baik, untuk pengawasan di dinas kami punya tim pengawasan cluster binaan yang mendampingi puskesmas Pembagian tujan sudah jelas berdasarkan SK dan tupoksi masing-masing, koordinasi antar bidang dan dinas juga sudah berjalan dengan baik Pembagian tugas sudah sangat jelas berdasarkan SK Bupati, tim kan sudah dibentuk dan sudah dikukuhkan, meskipun sudah terlambat dan juga melekat pada tupoksi masing-masing Pembagian tugas sudah sangat jelas pada lampiran SK dan memang juga sudah menjadi tupoksi kami Tugas kami masing-masing sudah termuat dalam sk, itu sudah sangat jelas dan itu juga secara garis besar merupakan tupoksi kami pembagian tugas jelas, sudah tertuang di sk Pembagian kerja berdasarkan tupoksi kami masing-masing dan mengacu kepada SK Bupati dan itu yang kami pedomani pembagian kerja mengacu kepada tupoksi masing-masing dan berpedoman pad ask yang sudah siterbitkan pembagian kerja dan tanggung jawab sudah ada pembagian kerja dan tanggung jawab berdasarkan keterlibatan yang ada dalam sk dan tupoksi masing-masing	Pembagian kerja sudah jelas, dengan uraian tugas yang didasarkan pada Surat eputusan Kepala Daerah tentang Tim percepatan penurunan stunting

Struktur Birokrasi	Informan	Emik (Sudut Pandang Informan)	Etik (Sudut Pandang Peneliti)
	<p>ALM</p> <p>HAA</p> <p>VIP</p> <p>RAH</p>	<p>Pembagian kerja dan tanggung jawab sudah jelas, masing-masing sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing</p> <p>“Pembagian kerja dan tanggung jawab sudah ada melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari semua OPD terlibat dengan uraian tugas yang jelas</p> <p>pembagian kerja dan tanggung jawab sudah ada sesuai dengan SK</p> <p>pembagian kerja, sudah sangat jelas, apalagi sudah diperkuat dengan SK, sehingga penanganan terkait stunting akan lebih baik</p>	
Kendala	YRP	Operasional pada saat turun lapangan masih perlu dipikirkan (biaya untuk bahan bakar), penginputan yang belum maksimal dari teman-teman di puskesmas, koordinasi antar OPD perlu dimaksimalkan	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jln.Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp.(0411) 585658,
E-mail : fkm.unhas@gmail.com, website: <https://fkm.unhas.ac.id/>

REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK

Nomor : 11906/UN4.14.1/TP.01.02/2022

Tanggal : 12 Oktober 2022

Dengan ini Menyatakan bahwa Protokol dan Dokumen yang Berhubungan dengan Protokol berikut ini telah mendapatkan Persetujuan Etik :

No.Protokol	30922012240	No. Sponsor Protokol	
Peneliti Utama	Annie Yunita Tandi	Sponsor	Pribadi
Judul Peneliti	Implementasi Aksi Konvergensi Pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara		
No.Versi Protokol	1	Tanggal Versi	30 September 2022
No.Versi PSP	1	Tanggal Versi	30 September 2022
Tempat Penelitian	Kabupaten Toraja Utara		
Judul Review	<input type="checkbox"/> Exempted <input checked="" type="checkbox"/> Expedited <input type="checkbox"/> Fullboard	Masa Berlaku 12 Oktober 2022 Sampai 12 Oktober 2023	Frekuensi review lanjutan
Ketua Komisi Etik Penelitian	Nama : Prof.dr.Veni Hadju,M.Sc,Ph.D	Tanda tangan 	Tanggal 12 Oktober 2022
Sekretaris komisi Etik Penelitian	Nama : Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes	Tanda tangan 	Tanggal 12 Oktober 2022

Kewajiban Peneliti Utama :

1. Menyerahkan Amandemen Protokol untuk persetujuan sebelum di implementasikan
2. Menyerahkan Laporan SAE ke Komisi Etik dalam 24 Jam dan dilengkapi dalam 7 hari dan Laporan SUSAR dalam 72 Jam setelah Peneliti Utama menerima laporan
3. Menyerahkan Laporan Kemajuan (progress report) setiap 6 bulan untuk penelitian resiko tinggi dan setiap setahun untuk penelitian resiko rendah
4. Menyerahkan laporan akhir setelah Penelitian berakhir
5. Melaporkan penyimpangan dari protocol yang disetujui (protocol deviation/violation)
6. Mematuhi semua peraturan yang ditentukan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658
E-mail : fkm.unhas@gmail.com, website : <https://fkm.unhas.ac.id/>

No : 10951/UN4.14.1/PT.01.04/2022
Lamp : Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 September 2022

Yth.
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Provinsi Sulawesi Selatan**

Di –
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Annie Yunita Tandi**
Nomor Pokok : **K012211008**
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka persiapan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Aksi Konvergensi pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara**".

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Amran Razak, SE.,M.Sc (Ketua)
2. Prof. Dr. Indar, SH.,MPH (Anggota)

Waktu Penelitian : September – November 2022

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin kepada yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Wahiduddin, SKM.,M.Kes
NIP. 19760407 200501 1 004

Tembusan :

1. Dekan FKM Unhas
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **9751/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Toraja Utara
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor : 10951/UN4.14.1/PT.01.04/2022 tanggal 20 September 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANNIE YUNITA TANDI**
Nomor Pokok : **K012211008**
Program Studi : **Ilmu Kesehatan Masyarakat**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km,. 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" IMPLEMENTASI AKSI KONVERGENSI PADA PROGRAM STUNTING DI KABUPATEN TORAJA UTARA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 September s/d 21 November 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 September 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pongtiku No.32 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dpmpstsp.torut@gmail.com
Website : http://dpmpstsp.torajautarakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 370/SRP/DPMPTSP/IX/2022

Menunjuk Surat **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan** Nomor : 9751/S.01/PTSP/2022, Perihal **Izin Penelitian** dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : **Annie Yunita Tandl**
Nomor Pokok : **K012211008**
Program Studi : **Ilmu Kesehatan Masyarakat**
Alamat : **Rantepao**

yang bermaksud mengadakan **Penelitian** dalam rangka penyusunan **Tesis** dengan Judul: **Implementasi Aksi Konvergensi pada Program Stunting di Kabupaten Toraja Utara** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **23 September 2022** sampai **21 November 2022**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil "**Penelitian**" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang- Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 26 September 2022

KEPALA DPMPTSP,

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ir. HARLI PATRIATNO, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19670503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Panga (Sebagai Laporan);
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara di Panga;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara di Panga;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Toraja Utara di Panga;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara di Panga;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan Kunci
(Kepala Bappelitbangda
Kab. Toraja Utara)

Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan Kunci
(Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Toraja Utara)



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kepala Bidang Kesmas
Dinas Kesehatan
Kab. Toraja Utara)



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kabid Pengembangan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan &
Perikanan Kab. Toraja Utara)

Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kepala Bidang Perlindungan &
Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kab. Toraja Utara)



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kepala Bidang Holtikultura
Dinas Pertanian Kab. Toraja Utara)

Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kepala Bidang Ketersediaan &
Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan
& Perikanan Kab. Toraja Utara)



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kabid Kelembagaan &
Sosbud Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Lembang Kab. Toraja Utara)



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kabid Permukiman Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman,
Lingkungan Hidup &
Pertanahan Kab. Toraja Utara)

Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Kab. Toraja Utara).



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kabid Pemerintahan Pembangunan
Manusia & Kesejahteraan Rakyat
Bappelitbangda Kab. Toraja Utara)

Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kepala Bidang PAUD
Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara).



Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kasie Kesehatan Keluarga &
Gizi Dinas Kesehatan
Kab. Toraja Utara)

Foto Wawancara Mendalam
dengan Informan
(Kepala Bidang Kesejahteraan
Keluarga
Dinas P3AP2KB Kab. Toraja Utara).



Foto Wawancara Mendalam dengan Informan
(TA Satgas Stunting Kab. Toraja Utara).



Foto Wawancara Mendalam dengan Informan
(Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Dinas P3AP2KB Kab. Toraja Utara).



RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : Annie Yunita Tandi
Tempat/Tanggal Lahir : Rantepao, 17 April 1988
Agama : Kristen Protestan
Email : annienita_ph06@yahoo.com
Alamat : Jl. Merpati No.16 Karassik, Rantepao-Torut

Riwayat Pendidikan:

- SD Kristen Disamakan 5 Rantepao (1995-2000)
- SMP Negeri 2 Rantepao (2000-2003)
- SMA Negeri 1 Rantepao (2003-2006)
- S1 Kesehatan Masyarakat (Biostatistik/KKB),
Universitas Hasanuddin (2006-2010)
- S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (AKK),
Universitas Hasanuddin (2021-2023)

Riwayat Pekerjaan:

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara